

# **Pendampingan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo**

**Ihda Arifin Faiz<sup>1\*</sup>, Faiz Zamzami<sup>2</sup>, Dina Natasari<sup>3</sup>, Rizky Wulandari<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>**Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada**

**\*ihda@ugm.ac.id**

## **ABSTRAK**

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan pengelolaan keuangan dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Binangun Mandiri Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDes adalah jasa keuangan dan perdagangan alat tulis kantor. Metode pengabdian yang digunakan adalah melalui pelatihan dan pendampingan selama periode waktu pengabdian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan desa, termasuk perangkat desa dan masyarakat luas. Program pengabdian ini dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola pada aspek keuangan BUMDes. Pengelolaan BUMDes yang baik merupakan salah satu aspek penting penguatan kemandirian masyarakat desa dengan berpijak pada pemanfaatan potensi lokal dalam upaya untuk memecahkan permasalahan masyarakat, terutama aspek perekonomian. Dari tiga indikator tata kelola BUMDes yang baik tampak bahwa BUMDes Binangun Mandiri Sidoharjo memiliki pengelolaan yang baik dengan didukung aspek struktural, finansial dan sosial yang baik. Keberadaan program pengabdian ini memperkuat aspek tata kelola keuangan yang ada.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Keuangan, BUMDes Binangun Mandiri, Desa Sidoharjo

## **ABSTRACT**

*This community service program aims to strengthen financial management and governance of the Binangun Mandiri Village Owned Enterprises (BUMDes) Sidoharjo Village, Samigaluh District, Kulon Progo Regency. The businesses run by BUMDes are financial services and office stationery trade. The service method used is through training and mentoring during the period of service that involves various village stakeholders, including village officials and the wider community. This service program can increase the capacity and capability of human resources managers in the financial aspects of BUMDes. Good management of BUMDes is one of the important aspects of strengthening the independence of rural communities by grounding in utilizing local potential in an effort to solve community problems, especially economic aspects. From the three indicators of good BUMDes governance it appears that BUMDes Binangun Mandiri Sidoharjo has good management supported by good structural, financial and social aspects. The existence of this service program strengthens aspects of existing financial governance.*

**Keywords:** financial governance; BUMDes BinangunMandiri, Sidoharjo Village

## **PENDAHULUAN**

Kecamatan Samigaluh memiliki visi ‘Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif’. Visi tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah Daerah yang tertuang dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2022 yang menyebutkan visi Pemda adalah ‘Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya iman dan taqwa’ serta misi ketiganya yaitu

“mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”.

Kecamatan Samigaluh terdiri dari 7 desa yaitu Desa Kebonharjo, Desa Banjarsari, Desa Purwoharjo, Desa Pagerharjo, Desa Ngargosari, Desa Gerbosari, dan Desa Sidoharjo. Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan Samigaluh memiliki beberapa batasan dengan wilayah lainnya yaitu batas utara adalah Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah; batas selatan adalah Kecamatan Girimulyo; batas barat adalah Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah; dan batas timur Kecamatan Kalibawang. Menurut BPS Yogyakarta, Kecamatan Samigaluh terdiri dari 7 desa, 16 pedukuhan, 210 rukun warga, dan 448 rukun tetangga. Dari aspek luas wilayah, kecamatan Samigaluh memiliki luas 6.923,31 ha (69,29 km<sup>2</sup>).

Dari aspek kependudukan, jumlah penduduk di kecamatan Samigaluh mencapai 26.416 jiwa yang terdiri dari 13.021 penduduk laki-laki dan 13.021 penduduk perempuan.

### **Desa Sidoharjo**

Desa Sidoharjo berjarak 5 km dari ibukota kecamatan dengan luas 1.374,46 atau 19,84% dari luas total kecamatan Samigaluh. Di desa ini, terdapat 18 padukuhan dengan jumlah RT sebanyak 85 dan jumlah RW sebanyak 39. Desa ini dipimpin oleh Bapak Umari. Di desa Sidoharjo ini terdapat beberapa perangkat pemerintah desa yaitu Kades sejumlah 1 orang, Sekdes sejumlah 1 orang, Kaur sejumlah 5 orang, Pembantu Kaur sejumlah 3 orang, dan Kadus sejumlah 18 orang. Total seluruh perangkat desa tersebut adalah 28 orang. Adapun komposisi penduduk yang menghuni wilayah ini adalah sejumlah 4.901 orang yang terdiri dari penduduk dewasa (L 577, P 542) dan anak-anak (L 1.851, P 1931).

### **Kondisi Mitra**

Mitra kerjasama yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini adalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. BUMDes ini telah berjalan dalam bidang usaha simpan pinjam. Perlu adanya penataan dan penguatan pemahaman atas pengelolaan keuangan BUMDes tersebut agar mempermudah dalam penilaian kinerja dan pengambilan keputusan strategis lainnya. Selama ini BUMDes Desa Sidoharjo menyelenggarakan jasa simpan pinjam atas dana yang dimiliki oleh BUMDes kepada masyarakat sekitar. Dari aspek kelembagaan, perlu adanya inovasi dan kreativitas untuk memperluas jenis usaha yang dijalani oleh BUMDes, terutama dalam upaya memberdayakan usaha yang telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Upaya ini dapat dicapai secara maksimal apabila BUMDes turut berkontribusi dan berkolaborasi dengan UMKM untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas produksi maupun pemasaran yang telah mereka jalani selama ini. Untuk itu, perlu penataan aspek pengelolaan keuangan terlebih dahulu agar perencanaan strategis tersebut dapat dikembangkan lebih cepat dengan berlandaskan fundamental pengelolaan keuangan yang tertib dan baik.

### **Permasalahan Mitra**

Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beroperasi di bidang jasa keuangan yaitu simpan pinjam pendanaan kepada masyarakat. Jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes ini tergolong jenis usaha yang tidak terlalu sulit dalam pengelolaannya dibanding jenis usaha lainnya dalam klaster usaha BUMDes. Bahkan terdapat adagium yang menyatakan bahwa jikalau suatu desa tidak dapat mengelola dana yang dimiliki dari Desa, mereka cukup menyediakan alokasi dana tersebut dan mekanisme untuk dapat dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sudah bisa dikategorikan ‘usaha’ yang dijalankan oleh BUMDes sebagai unit

usaha yang dimiliki oleh Desa karena dari sana BUMDes memperoleh pendapatan dari pinjaman yang dikelola. Jenis usaha ini juga tidak membutuhkan inovasi dan 'beban berat' dalam pengelolaannya sehingga terkesan hanya cukup duduk di kantor dan melayani masyarakat yang membutuhkan pendanaan maka pendapatan akan dapat diperoleh.

Di sisi lain, terdapat potensi masyarakat desa yang dapat dimaksimalkan untuk menggerakkan perekonomian di tengah-tengah masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan BUMDes lebih optimal. Untuk itu perlu adanya upaya dalam memperkuat peran BUMDes di tengah-tengah masyarakat dengan menggali potensi daerah yang mampu dimaksimalkan dalam bentuk kolaborasi pendanaan atau bahkan menjadikan BUMDes tidak hanya mengelola jasa keuangan (simpan pinjam) tetapi juga membuka lini usaha produktif, baik berupa bisnis perdagangan, manufaktur, wisata atau jenis bisnis lainnya. Hanya saja, dalam pengelolaan keuangan BUMDes saat ini perlu dilakukan pendampingan untuk memperkuat tata kelola bisnis dan tata kelola keuangan untuk usaha yang sedang dijalani. Diharapkan terdapat perbaikan pengelolaan keuangan pada bisnis yang saat ini dijalani, sehingga dalam upaya perluasan usaha untuk menggerakkan perekonomian di tengah masyarakat nantinya BUMDes telah memiliki kelayakan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang baik.

### **Laporan Keuangan**

SAK ETAP menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap mencakup neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Informasi tersebut nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak manajemen, pemberi pinjaman, investor, hingga

pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan menentukan langkah apa yang harus diambil setelahnya.

### **SAK ETAP**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang dimaksud entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, contohnya adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan umum yang lain dan mudah diterapkan bagi BALKONDes Saka Pitu. Selain itu, SAK ETAP juga tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang panjang sehingga relatif konsisten, maka dalam proses penyusunan laporan keuangan akan menghemat biaya dan tenaga.

### **Komponen Laporan Keuangan**

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

### **METODE**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang saling terkait dalam beberapa tahapan kegiatan dalam kurun waktu 6 bulan (Mei-Oktober 2021)

#### **1. Tahap Perencanaan**

Tahapan ini terdiri dari penyusunan proposal pengabdian kepada

masyarakat yang ditujukan kepada bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Vokasi UGM. Tahapan ini diawali dengan survei (pemetaan) pendahuluan atas kondisi daerah di Desa Sidoharjo yang berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan pengusul di bidang Akuntansi Sektor Publik sebagai dasar pengabdian masyarakat yang bertujuan terwujudnya tata kelola entitas sektor publik, terutama atas terselenggaranya pemerintahan desa yang baik. Pemetaan dilakukan sebagai dasar perencanaan pengajuan proposal pengabdian melalui kegiatan kunjungan pendahuluan kepada Kepala Desa Sidoharjo Bapak Umari. Setelah mendapatkan informasi pendahulu dan berdiskusi terkait usulan tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka tim pengabdian di tingkat Program Studi Akuntansi membahasnya secara bersama untuk menentukan topik terkait yang saling berhubungan dengan tema utama yang diangkat Prodi. Terdapat 4 proposal yang diajukan oleh Prodi Akuntansi yang terdiri dari 2 judul terkait pengelolaan BUMDes, 2 proposal terkait tata kelola APBDes dan 1 proposal terkait pengembangan budidaya perikanan. Seluruh proposal tersebut mendukung tema besar Prodi Akuntansi di bidang pengelolaan keuangan sektor publik sebagai salah satu topik tata kelola sektor publik yang diangkat oleh Sekolah Vokasi UGM.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Identifikasi tema atau topik pengabdian masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Terdapat dua tahap utama yaitu pelaksanaan pelatihan dan penerapan pengelolaan keuangan BUMDes. Pada pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes, materi disampaikan oleh para pengusul terkait konsep dasar dan regulasi tata kelola keuangan BUMDes sesuai aturan yang terkait, terutama aspek akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangannya. Dengan

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, pelatihan dilakukan secara bersama dalam satu forum yang berisi topik keuangan desa, tata kelola dan keuangan BUMDes dan Analisis Keuangan Desa. Pada forum tersebut, seluruh unsur terkait pengelolaan Desa, Pengelola BUMDes dan masyarakat dikumpulkan bersama sehingga keterkaitan antar topik dapat saling dipahami dengan baik. Konfirmasi dan aspek teknis dapat langsung didiskusikan dengan pihak terkait, baik dari unsur masyarakat, pengelola BUMDes maupun perangkat Desa.

Tahap pelatihan ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman dan dasar yang kuat bagi pengurus BUMDes terkait aspek akuntansi dan peraturan yang melingkupinya. Diharapkan pengurus BUMDes dapat memahami dasar akuntansi untuk pengelolaan data dan informasi keuangan sehingga dapat disusun mekanisme atau sistem informasi keuangan yang tepat bagi jenis usaha BUMDes yang dijalankan. Tahap selanjutnya adalah penerapan yang merupakan tahap pelaksanaan atas tahap pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, para pengelola BUMDes diharapkan telah mampu menerapkan konsep akuntansi dan penyusunan laporan keuangan secara tepat sesuai dengan jenis bisnis yang dijalaninya.

## **3. Tahap Pendampingan dan Evaluasi**

Pada tahapan ini, dilakukan pendampingan atas penerapan modul pengelolaan keuangan BUMDes serta dilakukan evaluasi terhadapnya. Pendampingan diperlukan untuk memastikan kesesuaian aspek dasar pengelolaan keuangan dengan berbagai aspek teknis yang melingkupi operasional BUMDes. Terdapat beberapa kondisi yang membutuhkan pendalaman dan analisis lebih lanjut karena memiliki keunikan sehingga diperlukan diskusi lebih lanjut untuk menyelesaikannya sesuai dengan konsep dasar akuntansi maupun regulasi yang terkait. Selain itu,

perlu evaluasi atas sejauh mana pemahaman pengelola BUMDes terhadap aspek operasional tata kelola keuangan yang dijalankannya. Jika diperlukan, dapat juga disusulkan beragam diskusi lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi atas kondisi yang tidak terduga.

Khalayak sasaran dari program pengabdian ini yang utama adalah pengelola BUMDes. Adapun khalayak pendukung adalah perangkat desa dan masyarakat secara luas. Indikator pelaksanaan program pengabdian ini tampak dari 3 aspek utama yaitu tata kelola struktur, tata kelola finansial dan dampak sosial. Secara umum, ketiga aspek tersebut telah dicapai secara baik oleh BUMDes. Adapun pengelola BUMDes menyampaikan butuh dukungan politik (*political will*) dari perangkat desa dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program BUMDes agar berjalan efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memaksimalkan potensi serta peran BUMDes Sidoharjo baik secara institusional kepada Desa maupun secara komunal kepada masyarakat secara luas. Sebagai lembaga berorientasi profit yang dimiliki oleh Desa, keberadaan BUMDes diharapkan tidak sekedar mampu mendukung desa dari keuntungan yang diperolehnya tetapi juga diharapkan mampu menggiatkan peran serta masyarakat dalam mengelola perekonomian desa secara mandiri melalui BUMDes sebagai motor dan akselerator. Harapan tersebut dapat diwujudkan dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan atau optimalisasi tata kelola BUMDes Binangun Mandiri Sidoharjo. Merujuk pada tujuan awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka pendampingan pengelolaan keuangan BUMDes Binangun Mandiri terlebih dahulu dilakukan melalui tahapan identifikasi tata kelola BUMDes

Tata kelola merupakan serangkaian struktur dan fungsi serta sistem dan proses yang telah ditetapkan untuk memastikan ketercapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh suatu organisasi. Tata kelola mencakup aspek Struktural, Finansial, dan Sosial

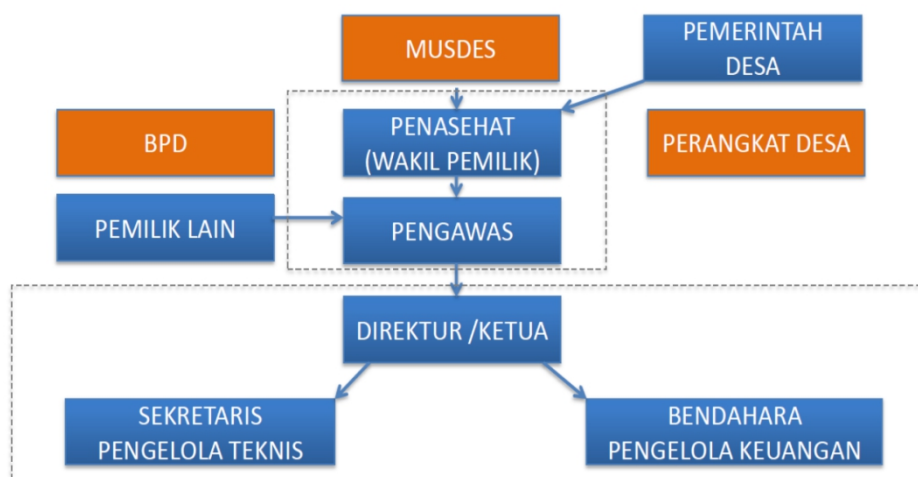
### A. Tata Kelola Struktural

BUMDes Binangun Mandiri didirikan pada tanggal 22 Agustus 2016 di Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Jenis usaha yang dikembangkan adalah jasa keuangan dan perdagangan yaitu fotocopi dan penjualan alat tulis kantor (ATK). Direktur BUMDes Binangun Mandiri adalah Ibu Tri Lestari dengan sekretaris Ibu Dewi Prahmawati dan Pembina Bapak Umari

Dari segi legalitasnya, BUMDes Binangun Mandiri didirikan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 7 tahun 2016 yang ditetapkan pada bulan Agustus. Kelengkapan organisasi BUMDes tertuang dalam Perdes tersebut mencakup aspek Anggaran Dasar di Bab III dan Anggaran Rumah Tangga tertuang di Bab IV.

Adapun dari segi administrasi, BUMDes Binangun Mandiri telah melengkapi identitas organisasi berupa struktur organisasi yang telah terpasang dan juga papan nama BUMDes terpasang di halaman kantor. Sebagai ruang administrasi dan operasional, digunakan ruang eks BPD Desa Sidoharjo dengan status pinjam. BUMDes Binangun Mandiri juga telah membuat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari setiap perangkat pengurus.

Struktur kepengurusan BUMDes BM secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan Permendes No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Bila dijabarkan dalam bentuk grafis, ketentuan struktur kepengurusan BUMDes berdasarkan Permendes 4/2015 adalah sebagaimana tampak pada gambar 1 Tata Kelola BUMDes



**Gambar 1.** Tata Kelola BUMDes

BUMDes Binangun Mandiri telah memiliki struktur pengawas, direktur/ketua, sekretaris dan bendahara serta karyawan. Untuk posisi penasehat, pada BUMDes Binangun Mandiri dinamakan Pembina. Perbedaan penamaan tersebut tidak memiliki perbedaan secara substansial. Selain itu, BUMDes Binangun Mandiri juga memiliki struktur kepala unit sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan usaha.

Secara kelembagaan, BUMDes Binangun Mandiri telah melengkapi struktur dan fungsi organisasi dengan cukup baik. Hal ini tampak dari kelengkapan tupoksi yang telah dipersiapkan secara baik. Aspek cakupan struktur yang diwajibkan oleh Permendes 4/2015 telah tercantum di dalam organisasi. Selain itu, juga ditambahkan struktur dan fungsi kepala unit dan karyawan. Kelengkapan struktur dan fungsi merupakan aspek vital untuk dapat menjalankan suatu organisasi secara baik, disamping juga mengantisipasi perkembangan mendatang atas kondisi lingkungan maupun tumbuh dan berkembangnya organisasi.

Hanya saja, secara nyata jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam struktur BUMDes ternyata masih kurang. Di tingkat manajerial, kini hanya ada Direktur yang dijabat oleh Ibu Tri Lestari dan Sekretaris Ibu Dewi Prahmawati. Pada awal berdirinya,

terdapat 3 personal yang *in charge* di BUMDes tersebut yang menduduki posisi bendahara. Akan tetapi dalam perkembangannya, staf tersebut mengundurkan diri. Keberadaan jumlah SDM tentu berperan penting terhadap berjalannya suatu organisasi karena unsur pelaku merupakan subyek penting berjalannya entitas tersebut. Pihak Desa perlu memikirkan secara serius kebutuhan pokok penambahan jumlah SDM di BUMDes ini agar dapat berfungsi secara maksimal

## **B. Tata Kelola Finansial**

Tujuan dari pengelolaan keuangan adalah untuk memperoleh informasi keuangan yang valid dan relevan terkait pengambilan keputusan organisasi. Setiap perencanaan dan tindakan yang diambil oleh manajerial terkait upaya untuk mencapai tujuan entitas membutuhkan informasi keberadaan (kondisi) sumber daya (*resources*) yang dimiliki dengan denominasi moneter yang tepat dan akurat. Informasi ini menjadi aspek penting bagi manajemen untuk dapat membuat keputusan yang tepat dari suatu perencanaan yang memadai. Kesalahan dalam mengidentifikasi keberadaan sumber daya dan rencana atau target yang hendak dicapai akan mengakibatkan kegagalan dari suatu kegiatan, bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan.

Prinsip utama pengelolaan keuangan adalah cepat, mudah, andal,

dan relevan. Meskipun terdapat beragam konsep atau teori terkait pengelolaan keuangan suatu entitas (menyesuaikan ukuran, bentuk dan orientasi entitas), tujuan dari tata kelola keuangan adalah untuk mendapatkan informasi keuangan yang cepat, mudah, andal dan relevan. Konsep dasar ini nantinya dapat dikembangkan seiring tumbuh dan

berkembangnya BUMDes, baik dari aspek lingkup bisnis maupun ukuran keuangan.

Dari tata kelola keuangan yang baik, BUMDes Binangun Mandiri dapat memberikan manfaat perekonomian secara luas di berbagai bidang kemasyarakatan sebagaimana tampak dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Aspek Manfaat atau Dampak BUMDes Binangun Mandiri

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Penyerapan Tenaga Kerja	3	Karyawan yang bekerja di Bumdesa
2	Mitra Internal BUM Desa	7	Pemdes, Kepala Desa, BPD, Nasabah Penabung, Peminjam, Sekolah-sekolah se Desa Sidoharjo, Distributor
3	Lapangan Pekerjaan	2	Direktur, Sekretaris
4	Keterjaminan Sosial	1	Keikutsertaan peserta BPJS Ketenagakerjaan
5	Pertumbuhan Usaha Baru	1	Usaha Baru Perdagangan ( Foto copy dan Penjualan ATK)
6	Peningkatan Omzet Anggota		
7	Pinjaman Konsumtif		Rp. 447.850.000,-
8	Pinjaman Produktif		Rp. 622.600.000,-

Tampak dari tabel 1, dari 3 tenaga kerja yang menjalankan BUMDes terdapat 7 mitra internal yang dapat merasakan manfaatnya yaitu Pemdes, Kepala Desa, BPD, Nasabah Penabung, Peminjam, Sekolah-sekolah se Desa Sidoharjo, Distributor. Bidang usaha jasa keuangan yang menjadi *core business*nya mampu menyalurkan dana pembiayaan sebesar Rp. 447.850.000,00 untuk pinjaman konsumtif dan sebesar Rp. 622.600.000,00 untuk pinjaman produktif.

#### **Tinjauan manajerial unit usaha**

Selain mendapatkan dana dari Desa berupa penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa, BUMDes Binangun Mandiri juga memanfaatkan perolehan dana secara kreatif dari berbagai pihak lain yang dimungkinkan. Terdapat 2 jenis dana sosial yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh BUMDes untuk menopang kegiatan dan penyaluran di Desa Sidoharjo yaitu melalui pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pemanfaatan dari program kredit sebrakan.

Dari pemanfaatan dana CSR dapat digunakan untuk aktivitas penghargaan bagi para anak yang berprestasi di Sekolah Desa Sidoharjo. Selain itu, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk setiap kegiatan masyarakat seperti Karang Taruna, Takmir Masjid, Pasar, Merti Dusun dan lainnya. Beragam kegiatan yang memanfaatkan dana CSR tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan masyarakat Desa Sidoharjo.

Adapun program kredit sebrakan yang dikelola oleh BUMDes dimanfaatkan untuk penyaluran pinjaman bagi para nasabah dengan tempo pendek, maksimal 3 bulan lunas. Program ini bertujuan untuk memberikan pinjaman tepat guna bagi para pedagang kambing atau ayam atau sapi yang ada di Desa Sidoharjo. Bisnis utama jasa keuangan yang dikelola oleh BUMDes pada tahun 2018 mencatatkan keuntungan sebesar Rp90.213.400

#### **Tinjauan Kinerja Keuangan**

Ditinjau dari aspek kinerja keuangan, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan tingkat perkembangan BUMDes Binangun Mandiri yang



semakin baik. Permodalan BUMDes diperoleh dari APBD Kabupaten Kulon Progo di tahun 2017 dan APBN di tahun

2018. Berikut adalah rincian perolehan permodalan BUMDes Binangun Mandiri

**Tabel 2.** Permodalan BUMDes Binangun Mandiri Sidoharjo

Nama Kegiatan/Program	Tahun	Sumber Permodalan (Rp)					Jumlah
		ABPN	APBD Prop.	APBD Kab.	APBDes	Pihak Lain	
1. Unit Simpan Pinjam	2017			652.724.000			652.724.000
2. Untuk Unit Perdagangan	2018	50.000.000					50.000.000
<i>Total Dana (Rp)</i>		50.000.000		652.724.000			702.724.000

Sumber: BUMDEs BM

Dari permodalan yang dimiliki oleh BUMDes, terdapat perkembangan sebesar 62,2%. Dalam masa waktu sekitar 3 tahun kenaikan tersebut menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik. Di sisi lain rasio efisiensi penggunaan aset ditaksir sebesar 5,95%. Hal ini menunjukkan pemanfaatan aset yang digunakan dengan optimal. Ditinjau dari aspek penggunaan biaya untuk memperoleh pendapatan, terdapat efisiensi sebesar 51,76%. Persentase ini menunjukkan bahwa BUMDes dapat

menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan pendapatan secara maksimal. Ditinjau dari aspek laba yang diperoleh dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh BUMDes tampak rasio sebesar 8,22%. Artinya dengan aset yang dimiliki saat ini, BUMDes mampu memperoleh laba sebesar 8,22% yang menunjukkan kondisi yang cukup baik. Beberapa tinjauan kinerja keuangan tersebut secara ringkas tampak pada tabel 3.

**Tabel 3.** Kinerja Keuangan BUMDes Binangun Mandiri Sidoharjo

<b>A. Perkembangan Modal</b>	
1. Modal Awal	Rp. 652.724.000,-
2. Jml Pasiva (Utang + Modal)	Rp. 1.096.333.968,-
3. Jml Kewajiban/Hutang	Rp. 37.608.045,-
4. Jml Modal setelah berkembang (2-3)	Rp. 1.058.725.923,-
5. Rasio Perkembangan Modal (4-1:1)x100%	62.2%
<b>B. Perkembangan Aset</b>	
1. Aset Saat ini	Rp. 1.096.333.968,-
2. Aset Awal	Rp. 1.034.697.199,-
3. Perkembangan Aset (1-2)	Rp. 61.636.769,-
4. Rasio (%) Efisiensi (1:2)*%	5,95%
<b>C. Efisiensi</b>	
1. Total Biaya	Rp. 96.826.513,-
2. Total Pendapatan	Rp. 187.039.928,-
3. Rasio (%) Efisiensi (1:2)*%	51,76%
<b>D. SHU terhadap Aset</b>	
1. Jumlah SHU	Rp. 90.213.400,-
2. Total Aset (Aktiva)	Rp. 1.096.333.968,-
3. Rasio (%) SHU thd Aset (1:2)*%	8,22%

Sumber: BUMDEs BM

Dari beragam ukuran kinerja keuangan yang tampak baik di atas, perlu juga dilihat aspek distribusi laba yang

diperoleh tiap tahun serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Berikut ini adalah tabel 4. Laba dan



## Kontribusi BUMDes Binangun Mandiri Sidoharjo

**Tabel 4.** Laba dan Kontribusi BUMDes Binangun Mandiri Sidoharjo

Tahun	Laba (Rp)	Kontribusi terhadap PADes (Rp)
2015	81.390.595	40.695.298
2016	95.389.085	47.694.543
2017	86.097.413	43.048.707
2018	90.213.400	45.106.700
		176.545.247

Sumber: BUMDes BM

### C. Aspek Sosial

Salah satu aspek dari tata kelola BUMDes yang penting adalah dampak dan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan atau manfaat yang diperoleh secara tidak langsung. Meskipun BUMDes merupakan salah satu unit bisnis yang diselenggarakan oleh Desa yang berorientasi profit, tidak menutup kewajiban untuk melibatkan atau mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat atau sosial. Meskipun tidak dipersyaratkan atau menjadi aturan secara eksplisit di Permendes terkait BUMDes, pihak Desa Sidoharjo telah melakukan identifikasi dampak sosial keberadaan BUMDes Binangun Mandiri.

#### Transparansi dan Partisipasi

Keberadaan BUMDes sebagai salah satu instrumen bisnis di Pemerintah Desa tidak bisa dilepaskan dari aspek politik dan kemasyarakatan. Aspek

politik pada bidang bisnis tersebut tampak dari indikator transparansi dan partisipasi masyarakat baik dalam pemanfaatan modal, menabung ataupun pemanfaatan layanan dan jasa yang diberikan oleh BUMDes. Masyarakat telah dapat memanfaatkan modal pinjaman yang diberikan baik untuk tujuan konsumsi maupun produksi. Dari rasio perbandingan antara pinjaman konsumtif dan produktif tampak lebih banyak digunakan untuk tujuan produktif.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan jasa keuangan berupa tabungan yang disediakan untuk menyimpan kelebihan dana mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan jasa fotokopi dan penyediaan alat tulis kantor bagi mereka yang membutuhkan, baik saat berurusan dengan Desa ataupun untuk keperluan sekolah keluarganya. Ringkasan aspek transparansi dan partisipasi tampak pada tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5.** Aspek Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

No	Jenis Kegiatan Transparansi/Partisipasi Masyarakat	Uraian Kegiatan	Tujuan
1.	Pemanfaat Modal	Masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya	Kecukupan modal untuk mengembangkan usaha
2.	Penabung	Masyarakat yang menyimpan dana pada Bumdes	Keamanan/menabung
3.	Konsumen Fotokopi dan ATK	Masyarakat yang datang ke kantor BUMDesa untuk Fotokopi dan Pembelian ATK	Membantu warga Sidoharjo yang mau Fotokopi dikarenakan belum ada Fotokopian dan menyediakan Alat Tulis Kantor

#### Pemberdayaan

Keberadaan BUMDes juga berperan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Dua jenis

pemberdayaan utama yang diberikan adalah penyediaan permodalan dan juga penjualan produk UKM. Penyediaan permodalan Memberikan pelayanan

permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha baik sektor Pertanian, Industri Kecil, Perdagangan, Jasa maupun Investasi. Adapun penjualan produk UKM dapat membantu Membantu menjualkan produk UKM yang ada diwilayah Desa Sidoharjo dan sekitarnya

### **Kemitraan dan Jejaring**

Selain bermanfaat untuk mendukung berbagai institusi internal desa, BUMDes juga melakukan kemitraan dan jejaring dengan pihak eksternal. Terdapat dua mitra utama yaitu Bank Pasar Kulon Progo dan BPJS Ketenagakerjaan. Bank Pasar Kulon Progo menjadi mitra di sektor perbankan untuk mendukung perkembangan BUMDes dari aspek operasional dan bisnis. Adapun BPJS Ketenagakerjaan merupakan mitra dalam memberikan jaminan bagi tenaga kerja dan juga jaminan sosial

### **SIMPULAN**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Binangun Mandiri Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo memiliki usaha utama jasa keuangan dan usaha pendukung berupa perdagangan alat tulis kantor. Aspek legalitas dan kelembagaan struktural telah dipersiapkan dengan baik oleh Kepala Desa dalam membangun dasar utama organisasi. Struktur dan fungsi yang ada juga telah sesuai dengan ketentuan Permendes 4 tahun 2015. Disamping itu, aspek keuangan juga menunjukkan adanya kemajuan dan indikator kinerja yang baik, selain permodalan yang mencukupi. Pihak manajemen juga telah mampu memanfaatkan sumber daya eksternal dalam mendukung program dan kegiatan BUMDes. Dampak ekonomi telah dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, BUMDes juga turut berkontribusi terhadap Pendapatan

Asli Desa secara optimal. Aspek sosial juga turut dirasakan oleh masyarakat sekitar seiring dengan keberadaan BUMDes. Keterlibatan, partisipasi, dan transparansi masyarakat terhadap BUMDes ditunjukkan dengan pemberdayaan dan menguatnya jejaring dan mitra BUMDes berdampak pada masyarakat secara luas

Keberadaan BUMDes Binangun Mandiri masih memiliki keterbatasan personalia (SDM) yang mencukupi untuk dapat menjalankan proses bisnis dengan optimal. Perlu adanya keterlibatan secara aktif dari perangkat Desa untuk mengatasi kekurangan SDM tersebut. Selain itu, bisnis jasa keuangan dirasa tidak bisa optimal memberdayakan potensi ekonomi masyarakat. Perlu adanya langkah-langkah inovatif dan kreatif untuk mendorong pengembangan bisnis yang berorientasi pada sektor riil atau mendorong sektor perekonomian utama di tengah-tengah masyarakat seperti bidang pertanian, perkebunan maupun perikanan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Yogyakarta. 2018. Kecamatan Samigaluh dalam Angka
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Suryanto, Rudy. 2018. Peta Jalan Bumdes Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi Desa. Makalah disampaikan pada Seminar Ekonomi Kerakyatan Pusat Studi Ekonomi Rakyat, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM